

## PEMETAAN PENELITIAN PEMERINTAHAN

*Sutoro Eko*

No	Item	GOVERNMENT (G1)	GOVERNING (G2)	GOVERNABILITY (G3)	GOVERNANCE (G4)	GOVERNMENTALITY (G5)
1	Makna	Struktur dan institusi pemerintahan (konstitusi, representasi, relasi, formasi)	Perbuatan dan aktivitas memerintah. Ada juga yang pakai konsep menata (ordering)	Otoritas dan kapasitas memerintah	Tata pemerintahan: interaksi antara pemerintah-negara dengan masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi	Rasionalitas, strategi, taktik, kalkulasi pemerintahan dan memerintah.
2	Posisi epistemologis	G1 umumnya menjadi obyek studi yang didekati dengan politik, ekonomi politik, sosiologi, dll. G1 bisa juga menjadi perspektif, yang fokus pada institusi, untuk menjelaskan fenomena sosial	G2 memperluas obyek kajian ilmu pemerintahan. G2 umumnya bicara tentang "predikat" yang menasar pada "obyek" luas (air, hutan, petani, beras, kemiskinan, pembangunan, dll). P-O itu bisa didekati dengan institusi G1, G4, & G5	G3 tidak terpisah dari G2. Fokusnya pada predikat pemerintah, yakni efektivitas penggunaan otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah obyek tertentu.	G4 hadir sebagai obyek studi yang bisa disentuh dengan perspektif institusi, politik, sosiologi, ekonomi politik, dan G5. G4 juga bisa hadir sebagai perspektif untuk menyentuh G1, G2, dan G3.	Perspektif kritis temuan Michel Foucault yang didasarkan bahwa kekuasaan menyebar, termasuk bicara pengetahuan adalah kekuasaan. G5 sebagai perspektif atas G1, G2, G3 dan G4.
3	Tema Makro	Pola institusi G1: demokratis, birokratis, teknokratis, oligarkhis, populis, patrimonial, negara pegawai, negara administratif, negara peraturan, negara neoliberal, birokrasi representatif, negara korporatis, negara hadir, .. Pemerintahan langsung vs tidak langsung, divided vs unified, dll.	G2 the commons, G2 the poor, G2 the roads, G2, G2 economy, G3 development	G1 failure, state capacity, state failure, kinerja G1, quality of G1, dll	G4 anggaran, G4 air, G4 beras, G4 kebun, pemerintahan pasar, dll.	State G5, bureaucratic G5, democratic G5, development G5, dll

4	Konsep meso-mikro	Institusi, formasi, koalisi, kompetisi, kontestasi, oposisi, kolusi,	Reformasi, inovasi, proteksi, distribusi, provisi, alokasi, rekognisi, intervensi, imposisi, emansipasi, penetrasi, integrasi, privatisasi, represi, koersi, dll	Responsivitas, legitimasi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepercayaan, pelayanan, dll.	Negosiasi, kolaborasi, konsolidasi, partisipasi, transparansi, responsivitas, rente, privatisasi, rente, free rider, bandit, dll	Problematisasi, teknikalisisasi, teknokratisasi, standarisasi, program proyek,
5	Sebagai objek	Sosok institusi pemerintahan dijelaskan dengan sosiologi, politik, antropologi, psikologi, governmentality, dll.	Bentuk perbuatan pemerintah dijelaskan dengan sosiologi, institusionalisme, contentious politics, kekuasaan elite, governance, governmentality	Kapasitas (yang sukses dan gagal) pemerintah dijelaskan dengan berbagai perspektif ilmu sosial-politik, governance, governmentality.	Sosok tatakelola dijelaskan dengan politik, sosiologi, ekonomi-politik, administrasi, governmentality	G5 tidak sebagai objek studi
6	Sebagai perspektif	Institusi pemerintahan sebagai perspektif untuk menjelaskan berbagai fenomena seperti ketimpangan, kemiskinan, kemakmuran, konflik, dll.	Belum berdiri sendiri sebagai perspektif untuk interpretasi dan eksplanasi	G3 bisa menjadi perspektif untuk menjelaskan kegagalan versus kesuksesan kebijakan pemerintah.	Governance sebagai institusionalisme baru hadir sebagai perspektif atas fenomena pemerintahan dan fenomena sosial dan ekonomi-politik.	G5 adalah perspektif untuk membongkar kekuasaan dan kepentingan di balik rasionalitas pemerintahan, khususnya yang berasal dari kolonialisme, neoliberalisme, pengetahuan, keahlian dan teknokrasi.
7	Metode	Rasionalisme, konstruktivisme, kontekstualisme	Rasionalisme, konstruktivisme, kontekstualisme	Positivisme, rasionalisme, kontekstualisme	Rasionalisme, konstruktivisme, kontekstualisme	Postfoundasionalisme, analisis diskursus, etnografi
8	Arah dan ilustrasi studi	Misal: (1) studi tentang defisit demokrasi lokal dengan sudut pandang yang beragam: dinasti, oligarki, klientelisme, korupsi, governability, dll. (2) studi	Misal: studi tentang pemerintahb memerintah dana desa; memerintah kaum miskin, memerintah desa,	Misal: studi tentang kegagalan KUD, BUMDesa mangkrak, kemiskinan, ketimpangan, pelayanan	Misal: (1) studi yang melucuti diskursus dan praktik good governance dalam pemerintahan; (2) studi	Misal: (1) studi membongkat kontradiksi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (2) studi

		tentang kepemimpinan populis disentuh dengan teori aktor rasional atau behaviorisme	memerintah hutan, dll. Ini bisa didekati dengan ilmu sosial, maupun institusionalisme, governance, dan belakangan sangat membanjir studi dengan governmentality	publik yang buruk, kegagalan revitalisasi pertanian, dll. Tema ini didekati dengan ekonomi politik, institusi pemerintahan, governance, governmentality	yang menemukan pola tatakelola keuangan desa; (3) studi tentang perspektif ekonomi politik tentang tatakelola kelapa sawit; dll; (4) Studi tentang akuntabilitas kepala daerah yang misalnya didekati dengan institusionalisme; (5) studi partisipasi semu dalam pembangunan; (6) studi tentang negara, masyarakat dan swasta dalam sengketa agraria; (7) studi tentang ekonomi-politik tatakelola desa wisata	tentang tirani teknokrasi dalam pemerintahan dan pembangunan; (3) studi tentang anti-politik pengembangan kapasitas DPRD; (4) studi tentang teknokratisasi dana desa; (5) studi tentang kontradiksi standarisasi pelayanan publik; (6) studi tentang paradoks data pemerintah;
9	Contoh studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Robert Putnam (1993): modal sosial membuat demokrasi lokal, demokrasi lokal membuat layanan publik yang responsif dan pertumbuhan ekonomi.</li> <li>• D. Acemoglu &amp; J. Robinson (2012): kemiskinan disebabkan oleh institusi pemerintahan yang ekstraktif dan kemakmuran disebabkan oleh institusi pemerintahan yang inklusif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M. Grindle (2007): reformasi pemerintahan lokal karena hadirnya kepemimpinan wirausaha.</li> <li>• C. Von Luebke (2009): reformasi pemerintahan lokal karena insentif politik pemimpin lokal.</li> <li>• E. Ostrom (1990): pengelolaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Budi Winarno (2008): Kegagalan Organisasi Lokal dalam Pembangunan Desa,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gianpaolo Baiocchi dan Ernesto Ganuza, <i>Popular Democracy The Paradox of Participation</i> (2016): menunjukkan bagaimana instrumen partisipatif menjadi lebih terfokus pada pembentukan opini publik dan jauh lebih tidak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• James Ferguson (1990): pembangunan desa telah gagal memperbaiki kehidupan orang desa, sebab pembangunan adalah sebuah mesin antipolitik yang berbentuk industri, ekspansi birokrasi dan depolitisasi.</li> <li>• Tania Li (2012), pembangunan sebagai kehendak untuk</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C. Geertz (1980) dengan studi antropologi membuat konstruksi desa sebagai kolektivisme pluralistik</li> <li>• C. Waren (1993) dengan antropologi membuat konstruksi desa sebagai korporatisme masyarakat.</li> </ul>	<p>sumberdaya bersama melalui institusi kolaborasi komunitas bisa mencegah tragedi bersama, sekaligus membuahakan kemakmuran dan konservasi, ketimbang institusi regulasi negara dan institusi privatisasi pasar bebas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K,J Meier dkk (2019): reformasi telah gagal karena kegagalan institusionalisasi politik. Lembaga-lembaga politik gagal memberikan tujuan kebijakan yang jelas, jarang mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk menangani ruang lingkup masalah, dan tidak membiarkan birokrasi otonomi yang cukup dalam implementasi</li> </ul>		<p>memperhatikan, atau mampu mempengaruhi, reformasi aktual.</p>	<p>memperbaiki masyarakat telah gagal mencapai tujuannya melainkan malah justru memunculkan konflik baru dan semakin menjerumuskan masyarakat dalam jurang konflik sosial dan kemiskinan. Selain para wali masyarakat punya kepentingan, kegagalan pembangunan karena ditangani dengan “teknikalisasi permasalahan”, yaitu upaya mereduksi dan meringkas persoalan-persoalan menjadi sehimpunan variabel yang mudah dipahami, terukur, dan secara teknis dapat direkayasa. Persoalan relasi kuasa, kepentingan dan kecenderungan politik, keterbatasan akses terhadap sumber daya yang kesemuanya sangat bersinggungan</p>
--	---	---	--	--	--

						<p>dengan masalah ekonomi-politik, selalu diabaikan oleh pendekatan teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Suzan Ilcan dan Anita Lacey (2011), <i>Governing the Poor</i>: memaparkan cara-cara penggambaran dan kuantifikasi yang digeneralisasi meminggirkan orang miskin dan pengalaman mereka. Program bantuan telah membentuk pemahaman baru tentang kemiskinan yang lebih banyak mengatur orang miskin melalui reformasi neo-liberal daripada memberikan solusi adil terhadap kemiskinan.</li></ul>
--	--	--	--	--	--	---